



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 837/SEK/KU.04.2/08/2017

31 Agustus 2017

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Semester 1 Tahun Anggaran 2017 terkait PNB

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan Mahkamah Agung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun Anggaran 2017 perlu disampaikan bahwa:

1. Terdapat estimasi pendapatan yang tidak sesuai dengan Tupoksi Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Reboisasi (421411);
 - Pendapatan Bunga Lainnya (423319);
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411);
 - Pendapatan Hasi Denda dan Sebagainya (423414);
 - Penerimaan Kembali Belanja Pensiun (423912).
2. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UAPPA yang bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Lainnya (423119);
 - Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan (423143);
 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin (423145);
 - Pendapatan Bea Lelang (423227);
 - Pendapatan Bunga Lainnya (423319);
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411).
3. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional yang ada pada UAPPA-E1 Badan Urusan Administrasi (BUA) kode Unit Eselon I (01) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Legalisasi Tandatangan (423411);
 - Pendapatan Pengesahan Surat dibawah Tangan (423412)

- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera (423413);
 - Pendapatan Ongkos Perkara (423415);
 - Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya (423419).
4. Atas permasalahan sebagaimana pada nomor 1, satuan kerja diharapkan segera melakukan revisi DIPA (estimasi pendapatan) agar estimasi disesuaikan dengan tupoksi Mahkamah Agung RI (daftar satuan kerja terlampir);
 5. Atas permasalahan sebagaimana nomor 2, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan pendapatan-pendapatan yang sesuai dengan tupoksi Mahkamah Agung RI (daftar satuan kerja terlampir);
 6. Atas permasalahan sebagaimana nomor 3, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan Unit Eselon I pada masing-masing satuan kerja (daftar satuan kerja terlampir);
 7. Tata cara ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tgl 7 Oktober 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 8. Untuk pendapatan Jasa Giro Rekening Perkara berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara masuk kedalam pendapatan Hak Kepaniteraan Lainnya dengan kode MAP/akun 423419, dirubah dengan menerapkan sistem *Treasury National Pooling* hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 tentang penerapan *Treasury National Pooling* pada Rekening Pemerintah Lainnya;
 9. Terkait Pendapatan Legalisasi Tandatangan dengan kode MAP/Akun 423411 baik berupa Legalisasi tandatangan dengan tarif Rp.10.000,- maupun Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp. 5.000,-, tidak diperkenankan untuk dipungut. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (5) tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Batas waktu perbaikan/revisi/ralat sampai dengan tanggal 20 September 2017;
 11. Dokumen - dokumen perbaikan/revisi/ralat tersebut agar disampaikan ke Biro Keuangan bagian PNBPN melalui surel **keuangan.pnbp@yahoo.co.id**;
 12. Para pejabat yang berwenang pada satuan kerja masing-masing diminta untuk mengawal proses pendataan, pemeriksaan, dan perbaikan, serta memastikan kedepannya agar tidak terdapat estimasi pendapatan maupun realisasi PNBPN yang

bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung. Hal ini supaya sistem pengendalian internal terkait PNBPN berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI


A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

A. Daftar Satuan Kerja Yang Terdapat Estimasi Pendapatan yang tidak sesuai dengan tupoksi Mahkamah Agung RI

KKR:LRA.01

AKUN : 421411 Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi Yang Dialokasikan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.03.672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	10.000,
TOTAL			10.000,

KKR:LRA.01

AKUN : 423319 Estimasi Pendapatan Bunga Lainnya Yang Dialokasikan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.03.099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	60.000,
TOTAL			60.000,

KKR:LRA.01

AKUN : 423411 Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Yang Dialokasikan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	3.571.000,
2	005.03.099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	6.200.000,
3	005.03.099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	1.850.000,
4	005.03.099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	12.000.000,
5	005.03.099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	15.000.000,
6	005.03.099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	1.200.000,
7	005.03.099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	650.000,
8	005.03.099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	3.931.000,
9	005.03.099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	605.000,
10	005.03.099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	1.305.000,
11	005.03.099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	4.000.000,
12	005.03.099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	1.500.000,
13	005.03.099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGERAN	1.320.000,
14	005.03.099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	1.475.000,
15	005.03.099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	720.000,
16	005.03.099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	1.990.000,
17	005.03.099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	700.000,
18	005.03.099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	700.000,

19	005.03.099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	2.200.000,
20	005.03.099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	670.000,
21	005.03.099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	30.000,
22	005.03.099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	10.525.000,
23	005.03.099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	15.580.000,
24	005.03.099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	500.000,
25	005.03.099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	20.000.000,
26	005.03.099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	8.000.000,
27	005.03.099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	1.800.000,
28	005.03.099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	2.110.000,
29	005.03.099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	3.000.000,
30	005.03.099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	8.340.000,
31	005.03.099129	PENGADILAN NEGERI WATES	600.000,
32	005.03.099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	960.000,
33	005.03.099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	4.160.000,
34	005.03.099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	5.000.000,
35	005.03.099136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	1.200.000,
36	005.03.099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	1.200.000,
37	005.03.099138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	14.000.000,
38	005.03.099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	3.950.000,
39	005.03.099142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	600.000,
40	005.03.099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	525.000,
41	005.03.099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	5.500.000,
42	005.03.099145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	140.000,
43	005.03.099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	900.000,
44	005.03.099147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	2.997.500,
45	005.03.099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	750.000,
46	005.03.099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	11.000.000,
47	005.03.099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	0,
48	005.03.099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	600.000,
49	005.03.099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	4.000.000,
50	005.03.099156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	2.395.000,
51	005.03.099157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	1.000.000,
52	005.03.099158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	1.090.000,
53	005.03.099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	1.115.000,
54	005.03.099160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	5.575.000,
55	005.03.099161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	300.000,
56	005.03.099164	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	1.500.000,
57	005.03.099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	2.400.000,
58	005.03.099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	7.000.000,
59	005.03.099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	5.075.000,
60	005.03.099189	PENGADILAN TINGGI MEDAN	660.000,

61	005.03.099190	PENGADILAN NEGERI MEDAN	11.045.000,
62	005.03.099192	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	1.425.000,
63	005.03.099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	640.000,
64	005.03.099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	2.000.000,
65	005.03.099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	1.160.000,
66	005.03.099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	1.170.000,
67	005.03.099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	1.650.000,
68	005.03.099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	1.320.000,
69	005.03.099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	2.000.000,
70	005.03.099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	4.250.000,
71	005.03.099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	6.000.000,
72	005.03.099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	1.050.000,
73	005.03.099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	500.000,
74	005.03.099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	480.000,
75	005.03.099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	3.140.000,
76	005.03.099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	220.000,
77	005.03.099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	766.000,
78	005.03.099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	762.000,
79	005.03.099221	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	1.060.000,
80	005.03.099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	660.000,
81	005.03.099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	1.300.000,
82	005.03.099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	3.120.000,
83	005.03.099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	6.000.000,
84	005.03.099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	870.000,
85	005.03.099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	3.100.000,
86	005.03.099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	400.000,
87	005.03.099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	3.600.000,
88	005.03.099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	1.800.000,
89	005.03.099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	3.850.000,
90	005.03.099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	3.100.000,
91	005.03.099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	1.720.000,
92	005.03.099237	PENGADILAN NEGERI METRO	620.000,
93	005.03.099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	4.000.000,
94	005.03.099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	3.000.000,
95	005.03.099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	320.000,
96	005.03.099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	4.300.000,
97	005.03.099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	2.850.000,
98	005.03.099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	1.710.000,
99	005.03.099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	4.400.000,
100	005.03.099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	2.000.000,
101	005.03.099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	1.615.000,
102	005.03.099249	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	485.000,

103	005.03.099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	540.000,
104	005.03.099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2.500.000,
105	005.03.099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	1.680.000,
106	005.03.099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	1.515.000,
107	005.03.099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	16.930.000,
108	005.03.099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	5.000.000,
109	005.03.099376	PENGADILAN NEGERI PALU	1.000.000,
110	005.03.099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	600.000,
111	005.03.099402	PENGADILAN NEGERI POSO	4.500.000,
112	005.03.099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	5.720.000,
113	005.03.099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1.200.000,
114	005.03.099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	600.000,
115	005.03.099664	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	800.000,
116	005.03.099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	190.000,
117	005.03.099707	PENGADILAN NEGERI AMBON	3.000.000,
118	005.03.099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	7.500.000,
119	005.03.099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	2.000.000,
120	005.03.099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	14.840.000,
121	005.03.099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	560.000,
122	005.03.099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	2.200.000,
123	005.03.099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	9.320.000,
124	005.03.099863	PENGADILAN NEGERI MATARAM	50.000,
125	005.03.099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	9.465.000,
126	005.03.099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	3.710.000,
127	005.03.099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	796.000,
128	005.03.099913	PENGADILAN NEGERI PRAYA	3.030.000,
129	005.03.099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	1.200.000,
130	005.03.099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	1.200.000,
131	005.03.099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	600.000,
132	005.03.099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	600.000,
133	005.03.099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	335.000,
134	005.03.099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	2.000.000,
135	005.03.099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	705.000,
136	005.03.099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	120.000,
137	005.03.109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	1.350.000,
138	005.03.109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	13.550.000,
139	005.03.240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	80.000,
140	005.03.400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	2.700.000,
141	005.03.400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	1.200.000,
142	005.03.400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	80.000,
143	005.03.400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	45.000.000,
144	005.03.400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	2.000.000,

145	005.03.400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	6.500.000,
146	005.03.400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	4.500.000,
147	005.03.400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	4.000.000,
148	005.03.400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	400.000,
149	005.03.400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	2.500.000,
150	005.03.400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	1.800.000,
151	005.03.400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	500.000,
152	005.03.400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	240.000,
153	005.03.400142	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	670.000,
154	005.03.400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	60.000,
155	005.03.400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	2.700.000,
156	005.03.400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	3.000.000,
157	005.03.400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	240.000,
158	005.03.400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	10.000.000,
159	005.03.400312	PENGADILAN NEGERI BANGKO	200.000,
160	005.03.400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI	1.010.000,
161	005.03.400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	1.710.000,
162	005.03.400390	PENGADILAN NEGERI KISARAN	1.425.000,
163	005.03.400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	5.000.000,
164	005.03.400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	365.000,
165	005.03.400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	500.000,
166	005.03.400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	1.800.000,
167	005.03.400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	600.000,
168	005.03.400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	3.000.000,
169	005.03.400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	2.015.000,
170	005.03.400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	7.140.000,
171	005.03.400597	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	4.305.000,
172	005.03.400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	1.200.000,
173	005.03.477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	1.020.000,
174	005.03.477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	900.000,
175	005.03.477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	2.975.000,
176	005.03.477262	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	520.000,
177	005.03.477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	5.000.000,
178	005.03.477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	900.000,
179	005.03.477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	395.000,
180	005.03.477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	384.000,
181	005.03.626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	4.250.000,
182	005.03.653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	40.000,
183	005.03.663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	200.000,
184	005.03.663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	240.000,
185	005.03.670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	310.000,

186	005.03.670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	370.000,
187	005.03.670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	1.750.000,
188	005.03.672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	1.500.000,
189	005.03.672932	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	2.000.000,
190	005.03.672949	PENGADILAN NEGERI RANAI	55.000,
191	005.03.672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	230.000,
192	005.03.673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	1.200.000,
193	005.03.673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	5.004.000,
194	005.03.673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	3.310.000,
195	005.03.673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	400.000,
196	005.03.679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	270.000,
197	005.03.681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	800.000,
198	005.03.689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	160.000,
199	005.03.689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	370.000,
200	005.03.690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	10.455.000,
201	005.04.309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	5.300.000,
202	005.04.309077	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	15.490.000,
203	005.04.309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	1.185.000,
204	005.04.309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	1.000.000,
205	005.04.309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	105.000,
206	005.04.309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	2.110.000,
207	005.04.309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	360.000,
208	005.04.309101	PENGADILAN AGAMA TERNATE	3.615.000,
209	005.04.309102	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	9.000.000,
210	005.04.309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	430.000,
211	005.04.309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	9.000.000,
212	005.04.309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	7.810.000,
213	005.04.309115	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	50.000,
214	005.04.309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	545.000,
215	005.04.309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	7.000.000,
216	005.04.309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	190.000,
217	005.04.400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	44.400.000,
218	005.04.400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	30.000.000,
219	005.04.400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	2.410.000,
220	005.04.400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	6.810.000,
221	005.04.400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	600.000,
222	005.04.400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	1.780.000,
223	005.04.400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	600.000,
224	005.04.400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	2.191.000,
225	005.04.400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	600.000,
226	005.04.400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	45.420.000,
227	005.04.400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	600.000,

228	005.04.400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	600.000,
229	005.04.400968	PENGADILAN AGAMA PATI	600.000,
230	005.04.400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	11.465.000,
231	005.04.400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	600.000,
232	005.04.400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	240.000,
233	005.04.401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	900.000,
234	005.04.401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	600.000,
235	005.04.401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	295.000,
236	005.04.401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	600.000,
237	005.04.401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	1.610.000,
238	005.04.401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	1.300.000,
239	005.04.401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	500.000,
240	005.04.401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	600.000,
241	005.04.401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	30.100.000,
242	005.04.401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	600.000,
243	005.04.401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	19.390.000,
244	005.04.401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	500.000,
245	005.04.401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	12.000.000,
246	005.04.401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	480.000,
247	005.04.401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	1.000.000,
248	005.04.401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	480.000,
249	005.04.401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	6.360.000,
250	005.04.401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	22.260.000,
251	005.04.401220	PENGADILAN AGAMA WATES	6.000.000,
252	005.04.401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	7.795.000,
253	005.04.401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	13.090.000,
254	005.04.401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	20.000,
255	005.04.401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	2.680.000,
256	005.04.401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	1.235.000,
257	005.04.402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	4.000.000,
258	005.04.402036	PENGADILAN AGAMA TALU	12.000.000,
259	005.04.402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	2.660.000,
260	005.04.402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	5.700.000,
261	005.04.402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	75.000,
262	005.04.402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	300.000,
263	005.04.402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	95.000,
264	005.04.402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	800.000,
265	005.04.402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	3.000.000,
266	005.04.402350	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	5.000.000,
267	005.04.402356	PENGADILAN AGAMA METRO	1.200.000,
268	005.04.402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	2.610.000,
269	005.04.402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	330.000,

270	005.04.402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	140.000,
271	005.04.402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	300.000,
272	005.04.402645	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	920.000,
273	005.04.402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	173.000,
274	005.04.402821	PENGADILAN AGAMA SOE	75.000,
275	005.04.402840	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	60.000,
276	005.04.402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	6.340.000,
277	005.04.402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	2.500.000,
278	005.04.403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	12.390.000,
279	005.04.403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	270.000,
280	005.04.614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	2.690.000,
281	005.04.614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	4.000.000,
282	005.04.614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	8.000.000,
283	005.04.614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	310.000,
284	005.04.632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	550.000,
285	005.04.632065	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	100.000,
286	005.04.652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	790.000,
287	005.04.652056	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	1.345.000,
288	005.04.690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	10.806.000,
289	005.04.690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	3.335.000,
290	005.04.690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	10.000,
291	005.05.526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	4.000.000,
292	005.05.526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	12.000.000,
293	005.05.526751	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	3.160.000,
294	005.05.526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	1.255.000,
295	005.05.531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	3.000.000,
296	005.05.531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	3.000.000,
297	005.05.531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	3.000.000,
298	005.05.559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	3.000.000,
299	005.05.578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	900.000,
300	005.05.578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	600.000,
301	005.05.578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	3.000.000,
302	005.05.578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	1.570.000,
303	005.05.578872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	480.000,
304	005.05.578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	710.000,
305	005.05.690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	240.000,
306	005.05.690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	7.000.000,
TOTAL			1 079.766.500,

KKR:LRA.01

AKUN : 423414 Estimasi Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya Yang Dialokasikan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.03.099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	200.000,
2	005.03.477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	3.000.000,
3	005.03.673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	1.200.000,
4	005.04.309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	30.000,
TOTAL			4.430.000,

KKR:LRA.01

AKUN : 423912 Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu Yang

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	113.425,
TOTAL			113.425,

B. Daftar satuan kerja yang terdapat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UAPPA yang bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung RI

KKR:LRA.02

AKUN : 423119 Pendapatar Penjualan Lainnya

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	(9.300.000,)
2	005.01.401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	(8.799.999,)
3	005.03.099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	(240.000,)
TOTAL			(18.339.999,)

KKR:LRA.02

AKUN : 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.04.614770	PENGADILAN AGAMA SENTANI	(39.000,)
TOTAL			(39.000,)

KKR:LRA.02

AKUN : 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.04.402815	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	(30.000,)
TOTAL			(30.000,)

KKR:LRA.02

AKUN : 423227 Pendapatan Bea Lelang

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	(21.000,)
2	005.01.400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	(3.000.000,)
TOTAL			(3.021.000,)

KKR:LRA.02

AKUN : 423319 Pendapatan Bunga Lainnya

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.C4.402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	(125.000,)
2	005.C4.402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	(49.093,)
TOTAL			(174.093,)

AKUN : 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(8.955.000,)
2	005.03.099063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	(4.800.000,)
3	005.03.099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	(1.815.000,)
4	005.03.099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	(910.000,)
5	005.03.099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	(385.000,)
6	005.03.099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	(2.500.000,)
7	005.03.099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	(11.050.000,)
8	005.03.099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	(40.000,)
9	005.03.099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	(270.000,)
10	005.03.099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	(7.900.000,)
11	005.03.099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	(100.000,)
12	005.03.099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	(230.000,)
13	005.03.099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	(935.000,)
14	005.03.099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	(15.000,)
15	005.03.099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	(400.000,)
16	005.03.099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	(140.000,)
17	005.03.099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	(45.000,)
18	005.03.099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	(200.000,)
19	005.03.099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	(190.000,)
20	005.03.099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	(405.000,)
21	005.03.099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	(605.000,)
22	005.03.099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	(40.000,)
23	005.03.099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	(150.000,)
24	005.03.099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	(300.000,)
25	005.03.099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	(340.000,)
26	005.03.099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	(90.000,)
27	005.03.099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	(330.000,)
28	005.03.099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	(1.925.000,)
29	005.03.099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	(120.000,)
30	005.03.099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	(220.000,)
31	005.03.099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	(355.000,)
32	005.03.099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	(1.970.000,)
33	005.03.099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	(355.000,)
34	005.03.099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	(100.000,)

35	005.03.099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	(500.000,)
36	005.03.099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	(35.000,)
37	005.03.099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	(105.000,)
38	005.03.099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	(80.000,)
39	005.03.099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	(245.000,)
40	005.03.099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	(260.000,)
41	005.03.099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	(375.000,)
42	005.03.099163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	(20.000,)
43	005.03.099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	(110.000,)
44	005.03.099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	(655.000,)
45	005.03.099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	(740.000,)
46	005.03.099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	(10.000,)
47	005.03.099185	PENGADILAN NEGERI CALANG	0,
48	005.03.099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	(700.000,)
49	005.03.099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	(60.000,)
50	005.03.099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	(20.000,)
51	005.03.099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	(330.000,)
52	005.03.099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	(180.000,)
53	005.03.099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	(600.000,)
54	005.03.099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	(80.000,)
55	005.03.099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	(225.000,)
56	005.03.099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	(1.955.000,)
57	005.03.099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	(40.000,)
58	005.03.099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	(230.000,)
59	005.03.099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	(320.000,)
60	005.03.099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	(1.135.000,)
61	005.03.099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	(10.000,)
62	005.03.099237	PENGADILAN NEGERI METRO	(350.000,)
63	005.03.099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	(440.000,)
64	005.03.099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	(1.075.000,)
65	005.03.099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	(110.000,)
66	005.03.099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	(190.000,)
67	005.03.099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	(260.000,)
68	005.03.099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	(20.000,)
69	005.03.099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	(200.000,)
70	005.03.099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	(85.000,)
71	005.03.099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	(20.000,)
72	005.03.099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	(15.000,)

73	005.03.099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	(480.000,)
74	005.03.099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	(20.000,)
75	005.03.099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	(60.000,)
76	005.03.099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	(50.000,)
77	005.03.099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	(30.000,)
78	005.03.099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	(50.000,)
79	005.03.099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	(10.000,)
80	005.03.099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	(370.000,)
81	005.03.099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	(680.000,)
82	005.03.099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	(270.000,)
83	005.03.099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	(75.000,)
84	005.03.099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	(325.000,)
85	005.03.099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	(1.600.000,)
86	005.03.099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	(135.000,)
87	005.03.099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	(170.000,)
88	005.03.099770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(125.000,)
89	005.03.099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	(50.000,)
90	005.03.099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	(195.000,)
91	005.03.099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	(155.000,)
92	005.03.099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	(1.095.000,)
93	005.03.099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	(1.000.000,)
94	005.03.099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	(20.000,)
95	005.03.099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	(160.000,)
96	005.03.099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	(450.000,)
97	005.03.099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	(140.000,)
98	005.03.099973	PENGADILAN NEGERI WAKABUBAK	(30.000,)
99	005.03.109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	(275.000,)
100	005.03.400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	(75.000,)
101	005.03.400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	(2.420.000,)
102	005.03.400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	(285.000,)
103	005.03.400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	(30.000,)
104	005.03.400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	(395.000,)
105	005.03.400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	(140.000,)
106	005.03.400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	(400.000,)
107	005.03.400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	(650.000,)
108	005.03.400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	(85.000,)
109	005.03.400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	(720.000,)
110	005.03.400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	(1.175.000,)

111	005 03.400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	(285.000,)
112	005 03.400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	(430.000,)
113	005 03.400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	(140.000,)
114	005 03.400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	(2.850.000,)
115	005 03.400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL D SLAWI	(65.000,)
116	005 03.477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	(330.000,)
117	005 03.477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	(415.000,)
118	005 03.477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	(350.000,)
119	005 03.477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	(60.000,)
120	005 03.477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	(10.000,)
121	005 03.613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	(4.030.000,)
122	005.03.626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(265.000,)
123	005.03.663006	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	(5.000,)
124	005.03.663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	(5.000,)
125	005.03.670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	(115.000,)
126	005.03.670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	(70.000,)
127	005.03.672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	(5.000,)
128	005.03.672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	(15.000,)
129	005.03.673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	(45.000,)
130	005.03.673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	(1.190.000,)
131	005.03.673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	(10.000,)
132	005.03.679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	(205.000,)
133	005.03.689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	(1.300.000,)
134	005.04.309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	(340.000,)
135	005.04.309071	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	(90.000,)
136	005.04.309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	(820.000,)
137	005.04.309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	(250.000,)
138	005.04.309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	(20.000,)
139	005.04.309103	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	(15.000,)
140	005.04.309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	(90.000,)
141	005.04.309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	(4.475.000,)
142	005.04.309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	(280.000,)
143	005.04.309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	(155.000,)
144	005.04.309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	(105.000,)
145	005.04.309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	(20.000,)
146	005.04.309121	PENGADILAN AGAMA CURUP	(340.000,)
147	005.04.400617	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	(270.000,)

148	005.04.400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	(490.000,)
149	005.04.400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	(6.980.000,)
150	005.04.400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	(8.975.000,)
151	005.04.400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	(5.370.000,)
152	005.04.400685	PENGADILAN AGAMA CIMAHI	(6.220.000,)
153	005.04.400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	(19.790.000,)
154	005.04.400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	(22.680.000,)
155	005.04.400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	(400.000,)
156	005.04.400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	(585.000,)
157	005.04.400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	(435.000,)
158	005.04.400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	(970.000,)
159	005.04.400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	(5.220.000,)
160	005.04.400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(5.195.000,)
161	005.04.400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	(165.000,)
162	005.04.400802	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	(160.000,)
163	005.04.400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	(210.000,)
164	005.04.400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	(4.145.000,)
165	005.04.400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	(130.000,)
166	005.04.400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	(1.700.000,)
167	005.04.400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	(60.000,)
168	005.04.400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	(2.500.000,)
169	005.04.400906	PENGADILAN AGAMA BATANG	(100.000,)
170	005.04.400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	(530.000,)
171	005.04.400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	(21.735.000,)
172	005.04.400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	(23.980.000,)
173	005.04.400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	(1.470.000,)
174	005.04.400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	(1.530.000,)
175	005.04.400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	(60.000,)
176	005.04.401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	(435.000,)
177	005.04.401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	(2.650.000,)
178	005.04.401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	(510.000,)
179	005.04.401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	(1.070.000,)
180	005.04.401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	(70.000,)
181	005.04.401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	(255.000,)
182	005.04.401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	(13.320.000,)
183	005.04.401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	(18.230.000,)
184	005.04.401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	(4.160.000,)
185	005.04.401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	(70.000,)

186	005.04.401138	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	(270.000,)
187	005.04.401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	(26.540.000,)
188	005.04.401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	(55.000,)
189	005.04.401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	(830.000,)
190	005.04.401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	(8.430.000,)
191	005.04.401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	(590.000,)
192	005.04.401220	PENGADILAN AGAMA WATES	(720.000,)
193	005.04.401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	(765.000,)
194	005.04.401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	(1.470.000,)
195	005.04.401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	(13.545.000,)
196	005.04.401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	(7.540.000,)
197	005.04.401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	(5.040.000,)
198	005.04.401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	(6.115.000,)
199	005.04.401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	(15.160.000,)
200	005.04.401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	(5.420.000,)
201	005.04.401391	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	(2.995.000,)
202	005.04.401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	(40.000,)
203	005.04.401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	(3.530.000,)
204	005.04.401690	MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA	(60.000,)
205	005.04.401716	MAHKAMAH SYAR'ITYAH KOTACANE	(310.000,)
206	005.04.401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	(30.000,)
207	005.04.401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	(20.000,)
208	005.04.401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	(45.000,)
209	005 04.402036	PENGADILAN AGAMA TALU	(1.465.000,)
210	005 04.402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	(60.000,)
211	005 04.402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	(50.000,)
212	005 04.402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	(20.000,)
213	005 04.402186	PENGADILAN AGAMA JAMBI	(70.000,)
214	005 04.402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	(30.000,)
215	005 04.402206	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	(730.000,)
216	005 04.402212	PENGADILAN AGAMA BANGKO	(25.000,)
217	005.04.402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	(110.000,)
218	005.04.402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	(515.000,)
219	005.04.402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	(60.000,)
220	005.04.402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	(30.000,)
221	005.04.402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	(95.000,)
222	005.04.402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	(300.000,)
223	005.04.402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	(40.000,)

224	005.04.402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	(330.000,)
225	005.04.402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	(165.000,)
226	005.04.402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	(10.000,)
227	005.04.402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	(330.000,)
228	005.04.402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	(3.710.000,)
229	005.04.402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	(50.000,)
230	005.04.402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	(475.000,)
231	005.04.402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	(100.000,)
232	005.04.402821	PENGADILAN AGAMA SOE	(15.000,)
233	005.04.402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	(35.000,)
234	005.04.402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	(360.000,)
235	005.04.402996	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	(1.810.000,)
236	005.04.403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	(6.985.000,)
237	005.04.403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	(1.175.000,)
238	005.04.403053	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	(60.000,)
239	005.04.450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	(3.735.000,)
240	005.04.604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	(31.985.000,)
241	005.04.604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	(1.430.000,)
242	005.04.614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	(10.000,)
243	005.04.614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	(30.000,)
244	005.04.614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	(100.000,)
245	005.04.614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	(390.000,)
246	005.04.631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	(5.000,)
247	005.04.632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	(360.000,)
248	005.04.632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	(45.000,)
249	005.04.652021	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	(5.000,)
250	005.04.652035	PENGADILAN AGAMA SENGETI	(30.000,)
251	005 04.652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	(25.000,)
252	005 04.652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	(330.000,)
253	005 04.690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	(65.000,)
254	005 04.690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	(2.490.000,)
255	005 05.526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	(250.000,)
256	005 05.526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	(50.000,)
257	005 05.531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	(970.000,)
258	005 05.531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	(50.000,)
259	005 05.539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	(10.000,)
260	005.05.578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	(50.000,)
261	005.05.578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	(50.000,)

262	005.05.578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	(20.000,)
263	005.05.578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	(320.000,)
264	005.05.690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG1	(130.000,)
TOTAL			(438.050.000,)

C. Daftar satuan kerja yang terdapat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsional yang ada pada UAPPA-E1 Badan Urusan Administrasi (BUA)

KKR:LRA.03

AKUN : 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

NO	KODE	UNIT	NMSATKER	RP-IREAL
1	005.01.400781	.01.	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(8.955.000,)

KKR:LRA.03

AKUN : 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan

NO	KODE	UNIT	NMSATKER	RP-IREAL
1	005.01.626156	.01.	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(340.000,)
TOTAL				(340.000,)

KKR:LRA.03

AKUN : 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan

NO	KODE	UNIT	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.098370	.01.	PENGADILAN NEGERI NGAWI	(3.000)
2	005.01.400781	.01.	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(2.589.000)
3	005.01.402361	.01.	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	(357.000)
4	005.01.578839	.01.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	(12.000)
5	005.01.626156	.01.	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(243.000)
TOTAL				(3.204.000)

KKR:LRA.03

AKUN : 423415 Pendapatan Ongkos Perkara

NO	KODE	UNIT	NMSATKER	RP-IREAL
1	005.01.098370	.01.	PENGADILAN NEGERI NGAWI	(870.000,)
2	005.01.400781	.01.	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(21.250.000,)
3	005.01.402361	.01.	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	(11.430.000,)
4	005.01.578839	.01.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	(30.000,)
5	005.01.626156	.01.	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(3.080.000,)
TOTAL				(36.660.000,)

AKUN : 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

NO	KODE	UNIT	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.397872	.01.	PENGADILAN NEGERI BATANG	(21.000.000,)
2	005.01.398370	.01.	PENGADILAN NEGERI NGAWI	(123.600,)
3	005.01.307122	.01.	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	(9.809.000,)
4	005.01.400781	.01.	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(17.280.500,)
5	005.01.401350	.01.	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	(2.182.419,)
6	005.01.402273	.01.	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	(1.765.000,)
7	005.01.402361	.01.	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	(6.488.500,)
8	005.01.477306	.01.	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	(150.000,)
9	005.01.578839	.01.	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	(112.800,)
10	005.01.626156	.01.	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(1.412.950,)
TOTAL				(60.324.769,)